ANALISIS POTENSI EKONOMI NAGARI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB BAGIAN UTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Geografi (S1) pada Jurusan Geografi, FIS UNP



Oleh

RIRI HARYATI

84521/2007

JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Analisis Potensi Ekonomi Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara

Nama

: Riri Haryati

Bp/Nim

: 2007/84521

Jurusan

: Geografi

Program Studi

: Pendidikan Geografi

Jenjang Program

: S1

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial

Padang, September 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ernawati, M.Si

Nip: 196211251987032002

Ahyuni, S.T, M.Si

Nip: 196903232006042001

Ketua Jurusan

Dr. Paus Iskarni, M.Pd

Nip: 196305131989031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang

Judul

: Analisis Potensi Ekonomi Nagari di Kecamatan

Sungai Tarab Bagian Utara

Nama

: Riri Haryati

BP/NIM

: 2007/84521

Jurusan

: Geografi

Program Studi

: Pendidikan Geografi

Jenjang Program

: S1

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial

Padang, September 2011

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

Ketua

: 1. Dra. Ernawati, M.Si

Sekretaris: 2. Ahyuni, S.T, M.Si

Anggota: 3. Dra. Hj. Kamila Latif, M.S.

4. Drs. Ridwan Ahmad

5. Dra. Yurni Suasti, M.Si

ABSTRAK

Riri Haryati (2011) : Analisis Potensi Ekonomi Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, mendeskripsikan dan memetakan potensi nagari dilirik dari ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab bagian utara (nagari Rao-rao, Kumango, Koto Baru, Koto Tuo, Pasie Laweh) meliputi : pengangguran masyarakat, kesejahteraan keluarga, PDN, pendapatan perkapita, struktur mata pencaharian penduduk, penguasaan aset ekonomi, aset perumahan serta penguasaan aset ekonomi lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Tarab bagian Utara. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder serta data primer yang di dapat melalui wawancara dan responden yang terdiri dari Walinagari wilayah penelitian dan responden rumah tangga. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa persentase dan scoring.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa : potensi nagari di Kecamatan Sungai Tarab bagian utara dilihat dari ekonomi masyarakatnya tergolong ke dalam nagari yang berkembang. 1). Pengangguran: (30%) 2). Kesejahteraan Keluarga sudah tergolong baik, karena lebih dari 60% keluarga yang ada berada pada taraf sejahtera II dan sejahtera III 3). Pendapatan domestik nagari di dominasi oleh sektor pertanian ,ladang/perkebunan untuk 4 nagari, satu nagari oleh industri rumah tangga 4). Pendapatan perkapita di atas 1 juta untuk semua sektor 5) Struktur mata pencaharian penduduk paling banyak petani, lalu berladang/berkebun, jasa, perdangan serta industri rumah tangga seperti pengolahan bubuk kopi, kerupuk kulit dan pembuatan kurkuran. 6) Penguasaan aset ekonomi masyarakat untuk tanah 80% masyarakatnya memiliki tanah untuk kegiatan ekonomi. Lalu untuk transportasi umum hanya 6,58% dari seluruh total masyarakat yang mempunyai transportasi berupa ojek dan hanya 0,91 yang memiliki minibus/angkutan desa. Kemudian untuk sarana produksi masingmasing nagari memiliki> 5 jenis sarana produksi. 7) Aset perumahan yang ada di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara menurut dinding 38,24% tembok, 60,73% kayu dan 1,03% bambu . Berdasarkan lantai, 5,77% keramik, 31,49% semen dan 62,74% kayu. Lalu menurut atap 98,76% terbuat dari seng dan hanya 1,24% yang terbuat dari genteng. 8) Penguasaan aset ekonomi lainnya 39,76% dari total penduduk memiliki kendaraan bermotor, 40,68% memiliki surat dan barang berharga dan 53,05% penduduk memiliki ternak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Potensi Ekonomi Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara".

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di Jurusan Geografi FIS UNP. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tak akan mampu menuntaskannya dengan mudah tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak dan stakeholder yang ada. Karena itulah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Dra. Ernawati, M.Si selaku penasehat akademis sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta petunjuk dan saran bagi penulis. Sehingga penulis bisa merampungkan skripsi ini.
- 2. Ibu Ahyuni, ST, M.Si sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan masukan-masukan, motivasi dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis. Sehingga penulis bisa merampungkan skripsi ini.
- Ibu Dra. Kamila Latif M.S, Drs. Ridwan Ahmad, serta Dra. Yurni Suasti M.Si, sebagai tim penguji.
- 4. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta jajarannya yang telah merekomendasikan untuk melaksanakan penelitian.
- 5. Bapak Kepala KESBANGPOLLINMAS Kabupaten Tanah Datar yang telah memeberikan rekomendasi dan izin dalam pelaksanaan penelitian.
- 6. Bapak Camat Kecamatan Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar yang telah memberikan rekomendasi dan izin dalam pelaksanaan penelitian.

 Bapak Walinagari masing-masing nagari di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara, Kab. Tanah Datar yang telah banyak membantu dengan memberikan data dan informasi

8. Tokoh masyarakat beserta masyarakat nagari masing-masing daerah penelitian yang telah bersedia memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

 Ayahanda Yasmaizul dan Ibunda Asnidar beserta adik-adik ku dan nenek tercinta yang telah memberikan dorongan semangat secara moril dan materi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Rekan-rekan Jurusan Geografi FIS UNP, khususnya RB 07.

Semoga bantuan, bimbingan, kemudahan, pengorbanan serta dorongan semangat yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahawa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai stakeholder.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga apa yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTR	AK	. i
KATA I	PENGANTAR	ii
DAFTA	R ISI	iv
DAFTA	R TABEL	vii
DAFTA	R LAMPIRAN	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Fokus Penelitian	4
	C. Tujuan Penelitian	4
	C. Manfaat Penelitian	4
BAB I I	KAJIAN TEORITIS	6
	A. Kajian Teori	6
	1. Potensi dan Kondisi Nagari	. 6
	2. Penjabaran dan Penskoran Potensi Ekonomi	9
	3. Rekapitulasi Skoring Data Potensi Ekonomi Nagari	29
	B. Kerangka Konseptual	32
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	34
	A. Jenis Penelitian	34
	B. Populasi dan Sampel Penelitian	34
	C. Data dan Teknik Pengumpulan Data	36
	D. Teknik Analisa Data	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
	A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian	41
	1. Letak, Luas dan batas administrasi	41
	2. Kependudukan	43

B. Pembahasan Potensi Ekonomi	Nagari di Kecamatan Sungai Tarab
Bagian Utara	44
1. Penilaian Potnsi Ekonomi I	Nagari Untuk Menentukan Kategori
Nagari di Kecamatan Sungai Ta	arab Bagian Utara44
2. Rekapitulasi Total Skor Untu	ık Masing-Masing Nagari84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

1.	Tabel: II.1 Indikator, Penilaian dan Skor Pengangguran Masyarakat10
2.	Tabel II.2 Indikator Penilaian Untuk Kesejahteraan Keluarga12
3.	Tabel: II.3 Indikator Penilaian Untuk Pendapatan Domestik Nagari13
4.	Tabel: II.4 Indikator Penilaian untuk Pendapatan Perkapita
5.	Tabel: II.5 Indikator Penilaian Untuk Struktur Mata Pencaharian Penduduk
6.	Tabel: II.6 Indikator Penilaian Kondisi Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat
7.	Tabel: II.7 Indikator Penilaian Untuk Aset Perumahan27
8.	Tabel :II.8 Penilaian Terhadap Penguasaan Aset Ekonomi Lainnya31
9.	Tabel: II.9 Rekapitulasi Skoring Potensi nagari
10.	. Tabel: III.1 Nagari-nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab Bagiar Utara
11.	. Tabel: III.2 Jumlah responden berdasarkan Nagari
12.	. Tabel: III.3 Jenis Data, Sumber Data, Alat Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan data
13.	. Tabel: III.IV Kisi-kisi instrumen penelitian38
14.	. Tabel : III.V Ketentuan Nilai Skor Potensi Ekonomi Nagari40
15.	. Tabel: IV.1 Luas kecamatan Sungai Tarab per nagari
16.	. Tabel: IV.2 Tabel Penggunaan Lahan Di Kecamatan Sungai Tarab43
17.	. Tabel: IV.3 Luas Nagari, Jumlah Penduduk di Kecamatan Sungai Tarab
	Bagian Utara43

18. Tabel: IV.4: Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin44
19. Tabel : IV.5 Potensi Ekonomi Nagari berdasarkan pengangguran
Masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara47
20. Tabel: IV.6 Potensi Nagari Berdasarkan Kesejahteraan Keluarga50
21. Tabel: IV.7 Pendapatan Domestik Nagari di Kecamatan Sungai Tarab
Bagian Utara54
22. Tabel: IV.8 Pendapatan Perkapita di Kecamatan Sungai Tarab Bagian
Utara59
23. Tabel: IV.9 Struktur Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Sunga
Tarab Bagian Utara
24. Tabel: IV.10 Penguasaan Aset Tanah di Kecamatan Sungai Tarab Bagian
Utara64
25. Tabel : IV.11 Sarana Transportasi Umum di Kecamatan Sungai Tarab
Bagian Utara67
26. Tabel: IV.12 Penilaian Aset Sarana Produksi71
27. Tabel : IV.13 Jenis Dinding Rumah di Kecamatan Sungai Tarab Bagian
Utara74
28. Tabel : IV.15 Jenis Lantai Rumah di Kecamatan Sungai Tarab Bagian
Utara77
29. Tabel : IV.17 Jenis Atap Rumah di Kecamatan Sungai Tarab Bagiar
Utara
30. Tabel : IV.18 Aset Ekonomi Lainnya82
31. Tabel : IV.19 Skor Penilaian Penguasaan Aset Ekonomi Lainnya84
32. Tabel : IV.20 Rekapitulasi Penjumlahan Skor dari Masing-masing
Indikator 85

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Angket Penelitian	91
2.	Pengolahan Data Manual dan Mentabelkan	92
3.	Surat Izin Penelitian	114

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya pembangunan di suatu daerah sama halnya dengan pembangunan nasional, yaitu berpegang teguh atau belandaskan kepada prinsip pancasila dan prinsip negara kesatuan (http://google.com). Artinya, setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah harus merupakan kegiatan yang dapat memperkokoh negara kesatuan republik Indonesia. Baik dari segi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan maupun pertahanan keamanan. Nantinya pada pelaksanaan pembangunan itu akan digunakan dan dikelola sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Tentunya pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan sebuah desa atau di Sumatera Barat lebih dikenal dengan nama Nagari . Pembangunan yang akan dilakukan di Nagari akan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga seiring dengan pembangunan ini akan menimbulkan perubahan dari waktu ke waktu di Nagari tersebut. Perubahan yang dimaksud bisa berupa kemajuan maupun kemunduran.

Kecamatan Sungai Tarab merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan ini memiliki sepuluh Nagari dan 32 jorong. Adapun nama Nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab adalah Sungi Tarab, Rao-Rao, Kumango, Simpuruik, Gurun, Pasie Laweh, Koto Baru, Talang Tangah, Koto Tuo, dan Padang Laweh. (BPS Kabupaten Tanah Datar, tahun 2010). Namun yang peneliti jadikan daerah penelitian hanyalah bagian utara dari Kecamatan Sungai Tarab.

Hal ini karena adanya beberapa pertimbangan. Diantaranya, untuk meneliti suatu wilayah maka peneliti harus mengenal bagaimana nagari yang akan diteliti, kemudian berdasarkan penggunaan lahan dan pengamatan awal dilapangan, maka ketika peneliti akan meneliti bagian utara dari Kecamatan Sungai Tarab akan terdapat variasi potensi yang akan peneliti temukan serta keunikan lainnya dari masing-masing nagari. Sehingga nantinya, akan menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti.

Tentunya pembangunan yang dilakukan di Nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan juga. Perubahan yang dimaksud dapat ditilik dari berbagai segi, baik dari segi masyarakat, ekonomi, sarana dan prasarana, kelembagaan maupun sumber daya manusianya sendiri.

Guna mengetahui apakah sebuah Nagari tergolong sangat berkembang atau tidak berkembang maka perlu dilakukan sebuah tinjauan mengenai potensi Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara itu bagaimana. Sehingga nantinya bisa dilihat Nagari mana yang sangat berkembang dan mana pula Nagari yang tidak berkembang. Adapun yang dijadikan perhatian pada penelitian ini adalah ekonomi masyarakatnya.

Hal ini karena salah satu penentu kualitas penduduk yang akan berpengaruh sekali pada status perkembangan suatu Nagari memang ekonomi masyarakatnya. Maka dari itu pada penelitian kali ini peneliti menfokuskan pada ekonomi tersebut. Hasil dari penilaian potensi ekonomi nagari ini akan dijadikan acuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (Sila kelima pancasila).

Padahal dalam peraturan menteri departemen dalam negeri sejak tahun 2007 lalu sudah ada borang untuk melakukan penilaian terhadap potensi ekonomi Nagari, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun untuk menentukan potensi/tingkat perkembangan nagari itu bagaimanana. Sebenarnya sudah ada satu Nagari yang menerapkan data isian berdasarkan depdagri yaitu Nagari Rao-rao. Namun, itu baru satu tahun dilaksanakan. Ini diakui oleh Walinagari Rao-rao, tetapi tak ada kelanjutan dari pengisian itu oleh pemerintahan kecamatan. (Wawancara: 8 Juni 2011).

Untuk melihat kemajuan di tiap-tiap nagari dari waktu kewaktu maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Tapi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, hal tersebut tak pernah ada. Sehingga kita tak pernah tahu mana nagari yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan mana nagari yang bisa dijadikan contoh untuk pembangunan nagarinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, ditambah lagi dengan belum pernahnya penulis menemukan peneliti-peneliti terdahulu di jurusan

Geografi yang melakukan penelitian tentang ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Analisis Potensi Ekonomi Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara".

B. Fokus Penelitian

Berpatokan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan kepada potensi ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara. Adapun indikator pengukuran yang digunakan adalah:

- 1. Pengangguran
- 2. Kesejahteraan Keluarga
- 3. Pendapatan Domestik Nagari
- 4. Pendapatan Perkapita
- 5. Struktur Mata Pencaharian Penduduk
- 6. Penguasaan Aset Ekonomi
- 7. Aset Perumahan
- 8. Penguasaan Aset Ekonomi Lainnya

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan membahas tentang potensi ekonomi masyarakat masing-masing nagari sehingga diketahui kategori nagari di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara umum maupun secara khusus. Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi semua stakeholder yang ada, baik itu pemerintahan nagari, masyarakat maupun pemerintahan daerah. Manfaat penelitian secara khusus adalah:

- Untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Geografi,
 Universitas Negeri Padang.
- Dapat mengetahui keadaan potensi nagari di Kecamatan Sungai Tarab
 Bagian Utara dari segi ekonomi masyarakatnya.
- Sebagai gambaran dan bahan pertimbangan oleh pemerintahan masing-masing nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab Bagian Utara untuk mengambil kebijakan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

Kajian teori dimaksudkan sebagai suatu kerangka teoritis untuk dapat mengungkapkan dan menerangkan serta menunjukkan perspektif masalah penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai usaha mencari, mengidentifikasi dan menyusun serta mendiskusikan teori-teori ilmiah, asumsi para pakar, hasil penelitian yang erat kaitannya dengan variabel penelitian ini. Teori tersebut digunakan sebagai acuan yang mengarahkan tujuan penelitian.

1. Kondisi Nagari

a. Desa/Nagari

Menurut Wikipedia disebutkan bahwa Desa atau udik, menurut definisi *universal*, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Sementara menurut Sutarjo dalam Bakaruddin (2001:7) di paparkan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa melaksanakan pemerintahan sendiri.

Lain lagi halnya yang diungkapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kalu desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia (Salam, 2007:177).

Hal serupa juga disebutkan dalam undang-undang no 12 tahun 2007 mengenai peraturan menteri dalam negeri, tentunya dengan penambahan penekanan yakni berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dilengkapi juga dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar (no 4 tahun 2008), bahwa Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabbullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

Adapun ciri-ciri desa menurut Zamroni (2010:104) adalah (1) Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam, (2) Pertanian sangat bergantung pada musim, (3) Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja, (4) Struktur perekonomian bersifat agraris, (5) Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat (*gemmeinshaft*), (6) Norma agama dan hukum adat masih kuat, (7) Perkembangan sosial relatif lambat, (8) Sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal.

Kemudian secara kualitatif desa atau Nagari di bagi kedalam tiga tingkatan kutip Dwiyanto dalam (Asy'ari.1993:116-117) yaitu

- a. Desa swadaya (tradisional) adalah desa yang belum mampu mandiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tagganya sendiri, administrasinya belum terselenggara dengan baikdan LKMD belum berfungsidalam menggerakkan dan mengorganisasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.
- b. Desa swakarya (transisi) adalah desa telah mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, LKMDnya telah cukup berfungsi dalam menggerakkan dan mengogarnisasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara terpadu.
- c. Desa swasembada adalah desa yang mampu mandiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, administrasinya terselenggara dengan baik dan LKMD berfungsi mengerakakan dan mngogarnisasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.

b. Potensi dan Kondisi Nagari

Menurut Permendagri no 12 tahun 2007 Potensi Desa dan Kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara kondisi desa/Nagari/kelurahan adalah status tertentu dalam capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan kondisi kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintah Nagari dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa dan kelurahan.

Sementara indikator dari kondisi Nagari itu sendiri menurut mendagri dalam Sajogjo dan dikutip lagi oleh (Dwiyanto) adalah keadaan yang memberikan petunjuk (dapat diukur) sejauh mana hasil proses suatu kegiatan dalam program pembangunan desa telah di capai dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi itu dapat dilihat dari satu tahunan dan lima tahunan. Penilaiaan hasil kegiatan pembangunan tahunan dimaksudkan untuk megetahui laju perubahan dan kecepatan perkembangan penduduk, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat dalam pembangunan, kinerja lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan Nagari serta efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara dalam Zamroni (2010:104-105) di ungkapkan bahwa penilaian lima tahunan di maksudkan untuk mengetahui kemajuan suatu desa yang meliputi desa Swadaya yaitu desa yang bersifat tradisonal, desa swakarya yaitu desa yang mengalami transisi, serta desa swasembada yaitu desa yang lebih maju.

2. Penjabaran dan Penskoran Potensi Ekonomi Masyarakat

Potensi ekonomi masyarakat merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat bagaimana keberhasilan pembangunan dari aspek ekonomi. Adapun indikator yang dijadikan tolak ukur untuk menilik potensi ekonomi masyarakat yang ada di masing-masing Nagari di Kecamatan Sungai Tarab dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak (http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran).

Kemudian dalam Wibowo (http://pekoprabowo.blogspot.com/2011) pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- 1. Pengangguran Terselubung (*Disguissed Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- 2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- 3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Tabel: II.1 Indikator, Penilaian dan Skor Pengangguran Masyarakat

No	Indikator	Penilaian	Skor
1	Pengangguran masyarakat	Bila jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah, tidak bekerja dan bekerja tidak tentu. Lebih dari 80% dari total jumlah penduduk usia 18-56 Tahun 60-80% 40-60% 20-40% 10-20% Kurang dari 10%	1 2 4 6 8 10

Sumber: Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan, lampiran IV

2. Kesejahteraan Keluarga

Keluarga sejahtera seperti yang tercantum di dalam UU no 10 Tahun 1992 yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Lalu menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Ninghandayani, tiap keluarga yang ada Indonesia di data tiap Tahunnya dengan klasifikasi kelompok berikut:

a) Keluarga Pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

b) Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal pangan, sandang, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

c) Keluarga Sejahtera II

Yaitu selain mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangannya.

d) Keluarga Sejahtera III

Yaitu selain dapat mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif menyumbangkan dan belum giat dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan dsa atau wilayahnya.

e) Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu yang dapat memenuhi semua kebutuhan yang telah dipaparkan pada point sejahtera III, juga teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial.

Kemudian untuk melihat bagaimana kesejahteraan itu, bisa digunakan formula pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Penilaian Untuk Kesejahteraan Keluarga

No	Indikator	Penilaian	Skor
2	Kesejahteraan	Bila jumlah keluarga prasejahtera	
	Keluarga	dan sejahtera I lebih dari 75% dari	
		total jumlah keluarga	1
		50-75%	2
		40-50%	4
		20-40%	6
		10-20%	8
		Kurang dari 10%	10

Sumber : Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan, lampiran IV

3. Pendapatan Domestik Nagari

Tabel: II.3 Indikator Penilaian Untuk Pendapatan Domestik Nagari

No	Indikator	Penilaian	Skor
3	Pendapatan Domestik Desa a. Sub sektor pertanian	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan biaya yang dikeluarkan subsktor pertanian mencapai Kurang dari 5% dari total biaya yang dikluarkan Antara 5-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% Lebih dari 100%	4 5 6 7 8 9

No		Indikator	Penilaian	Skor
	b.	Sub sektor perkebunan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan subsektor perkebunan mencapai Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan Antara 5%-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% Lebih dari 100%	4 5 6 7 8 9 10
	c.	Sub sektor peternakan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan subsektor peternakan mencapai Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan Antara 5%-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% Lebih dari 100%	4 5 6 7 8 9 10
	d.	Sub sektor kehutanan	Bila jumalah selisih lebih antara total nilai produksi dengan biaya yang dikeluarkan subsektor kehutanan mencapai Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan Antara 5%-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% Lebih dari 100%	4 5 6 7 8 9 10

No		Indikator	Penilaian	Skor
	e.	Subsektor Kerajinan Subsektor industri	Bila jumalah selisih lebih antara total nilai produksi dengan biaya yang dikeluarkan subsektor kerajinan mencapai Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan Antara 5%-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% Lebih dari 100% Bila jumalah selisih lebih antara total nilai produksi dengan biaya yang dikeluarkan subsektor	4 5 6 7 8 9 10
	g,	Subsektor perdagangan besar dan	yang dikeluarkan subsektor industri pengolahan mencapai Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan Antara 5%-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% Lebih dari 100% Bila jumalah selisih lebih antara total nilai produksi dengan biaya yang dikeluarkan mencapai	4 5 6 7 8 9 10
		besar dan enceran	Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan Antara 5%-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% Lebih dari 100%	4 5 6 7 8 9 10

Sumber: Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan, lampiran IV

4. Pendapatan Perkapita

Secara umum menurut Hull dalam meta (2010) menyatakan bahwa pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan. Menurut sumbernya pendapatan secara umum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan formal yaitu pendpatan yang diperoleh secar regular biasanya diperoleh sebagai balas jasa, misalnya gaji, upah dan sebagainya
- b. Informal yaitu pendapata rumah tangga yang diperoleh dari hasil usaha sendiri, contohnya bertani, berdagang, beternak dan sebagainya.
- c. Penerimaan yang bukan suatu pendataan seperti dari uang warisan penjualan

Tabel: II.4 Indikator Penilaian untuk Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Menurut sektor usaha a. Sub sektor Pertanian Bila total jumlah pendapatan sektor pertanian dibagi jumlah total anggota keluarga petani dan buruh tani memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga pertanian mencapai: Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun 2	No	Indikator	Penilaian	Skor
Rp 5 juta-Rp 10 juta/tahun		Pendapatan perkapita Menurut sektor usaha	Bila total jumlah pendapatan sektor pertanian dibagi jumlah total anggota keluarga petani dan buruh tani memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga pertanian mencapai: Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun Rp 5 juta-Rp 10 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 15 juta /tahun Rp 15 juta-Rp 20 juta /tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta /tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta /tahun	1 2 5 7 8 9

No	Indikator	Penilaian	Skor
	b. Perkebunan	Bila total jumlah pendapatan sektor perkebunan dibagi jumlah total anggota keluarga dan buruh perkebunan memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga perkebunan setahun mencapai: Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun Rp 5 juta-Rp 10 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 15 juta /tahun Rp 15 juta-Rp 20 juta /tahun Rp 15 juta-Rp 20 juta /tahun	1 2 5 7 8
	c. Peternakan	Rp 20 juta-Rp 25 juta/tahun Lebih dari Rp 25 juta/tahun Bila total jumlah pendapatan sektor peternakan dibagi jumlah total anggota keluarga dan buruh peternakan memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga peternakan setahun	9 10
		mencapai: Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun Rp 5 juta-Rp 10 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 15 juta /tahun Rp 15 juta-Rp 20 juta /tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta /tahun Lebih dari Rp 25 juta/tahun	1 2 5 7 8 9 10
	d. Kerajinan	Bila total jumlah pendapatan sektor kerajinan dibagi jumlah total anggota keluarga dan buruh kerajinan memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga pengrjin setahun mencapai:	
		Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun Rp 5 juta-Rp 10 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 15 juta /tahun Rp 15 juta-Rp 20 juta /tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta /ta	1 2 5 7 8 9

No	Indikator	Penilaian	Skor
	f. Industri kecil, menengah dan besar	Bila total jumlah pendapatan sektor kehutanan dibagi jumlah total anggota keluarga dan buruh kehutanan memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga kehutanan setahun mencapai: Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 10 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 15 juta /tahun Rp 15 juta-Rp 20 juta /tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta/tahun Lebih dari Rp 25 juta/tahun Lebih dari Rp 25 juta/tahun Bila total jumlah pendapatan sektor industri kecil, menengah dan besar dibagi jumlah total anggota keluarga di sektor industri kecil, menengah dan besar serta buruh usaha industri memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga pertanian mencapai: Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun Rp 5 juta-Rp 10 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 15 juta /tahun Rp 10 juta-Rp 20 juta/tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta/tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta/tahun Lebih dari Rp 25 juta/tahun	1 2 5 7 8 9 10

No	Indikator	Penilaian	Skor
	g. Jasa dan perdagangan	Bila total jumlah pendapatan sektor jasa dan peragangan dibagi jumlah total anggota keluarga dan buruh di sektor usaha jasa dan perdagangan memperoleh rata-rata pendapatan peranggota keluarga setahun mencapai: Kurang dari Rp 2 juta/tahun Rp 2 juta-Rp 5 juta/tahun Rp 5 juta-Rp 10 juta/tahun Rp 10 juta-Rp 15 juta /tahun Rp 15 juta-Rp 20 juta /tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta /tahun Rp 20 juta-Rp 25 juta/tahun Lebih dari Rp 25 juta/tahun	1 2 5 7 8 9 10

Sumber : Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan, lampiran IV

5. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

Menurut KBBI Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang mengahasilkan uang untuk hidup. Senada dengan itu sukanto (1982) dalam meta memaparkan bahwa mata pencaharian merupakan pekerjaan atau usaha yang dilakukan untuk mendatangkan hasil untuk kehidupan. Dalam penelitian yang akan dilakukan kali ini, penilaian untuk struktur mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel:II.5 Penilaian Untuk Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Indikator	Penilaian	Skor
5	Struktur mata pencaharian menurut sektor a. Sektor pertanian 1. Petani	Jika tidak ada petani Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk 1-10% 10-20% 20-30% Lebih dri 30%	0 2 4 6 8 10

2. Buruh tani	No	Indikator	Penilaian	Skor
Jumlah total penduduk 2 4 15-30% 6 30-50% 8 Lebih dari 50% 10 3. Pemilik usaha pertanian		2. Buruh tani		0
3. Pemilik usaha pertanian				2
30-50% Lebih dari 50% Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 4 5-10% Lebih dari 15% 10			-	
Care			15-30%	6
3. Pemilik usaha pertanian			30-50%	
Deptanian Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 1-5% 4 4 5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 10				_
jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 6 10-15% Lebih dari 15% b. Sektor perkebunan 1. Buruh pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 2 5-15% 4 15-30% 30-50% Lebih dari 50% 2. Karyawan perusahan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 5-15% 4 15-30% 30-50% Lebih dari 50% 10 2. Karyawan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 1-5% 5-10% 6 10-15% Lebih dari 15% 3. Pemilik pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10 Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10 Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10 Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10 Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				0
1-5% 4 6 10-15% 8 10 10 10 10 15 10 10		pertanian	<u> </u>	2
5-10%			-	
10-15% 10 10 10 10 10 10 10 1				
b. Sektor perkebunan 1. Buruh pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50% 2. Karyawan perusahan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15% 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 10-15% Lebih dari 15% Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				
b. Sektor perkebunan 1. Buruh pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50% 2. Karyawan perusahan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15% 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10-15% 10 Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				_
1. Buruh pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50% 2. Karyawan perusahan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15% 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15% Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				
Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 4 15-30% 6 30-50% 10 0 2. Karyawan perusahan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 1-5% 4 5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 8 Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari 0		b. Sektor perkebunan		
Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 4 15-30% 6 30-50% 10 0 2. Karyawan perusahan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 1-5% 4 5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 8 Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari 0		1 D	Tiles 4i dele e de	0
jumlah total penuduk 5-15% 4 15-30% 6 30-50% 8 Lebih dari 50% 10 0 2. Karyawan perusahan perkebunan		1. Burun pekebur		U
5-15% 4 15-30% 6 30-50% 8 Lebih dari 50% 10 2. Karyawan perusahan perkebunan				2
15-30% 6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0				
Lebih dari 50% 2. Karyawan perusahan perkebunan 3. Pemilik usaha pekebunan Lebih dari 50% Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				
2. Karyawan perusahan perkebunan 2. Karyawan perusahan kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2. 1-5% 4. 5-10% 6. 10-15% 8. Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan 3. Kurang dari 1% dari 4. Comparison of the strength of the stre				8
2. Karyawan perusahan perkebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 1-5% 4 5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari 0			Lebih dari 50%	10
perusahan perkebunan Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 2 1-5% 4 5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				0
perkebunan jumlah total penuduk 2 1-5% 4 5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				
1-5% 4 5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari		-	_	•
5-10% 6 10-15% 8 Lebih dari 15% 10 3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari		perkebunan		
3. Pemilik usaha pekebunan Jika tidak ada Kurang dari 1% dari				
3. Pemilik usaha Jika tidak ada pekebunan Kurang dari 1% dari				
3. Pemilik usaha Jika tidak ada pekebunan Kurang dari 1% dari				
pekebunan Kurang dari 1% dari			20011 3411 1070	10
pekebunan Kurang dari 1% dari		3. Pemilik u	ısaha Jika tidak ada	0
			jumlah total penuduk	2
1-5%				
5-10%				
10-15% 8				
Lebih dari 15%			Lebin dari 15%	10

No Indikator	Penilaian	Skor
c. Peternakan 1. Buruh usaha peternakan 2. Pemilik usaha peternakan	Jika tidak ada buruh tani Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50% Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10%	0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8
d. Perikanan 1. Nelayan 2. Pemilik usaha perikanan 3. Buruh usaha perikanan	Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50% Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15% Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0

No		Indikator	Penilaian	Skor
	e.	Kehutanan 1. Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5%	0 2 4
		2. Buruh usaha pengolahan hasil	5-10% 10-15% Lebih dari 15% Jika tidak ada Kurang dari 5% dari	6 8 10 0
		hutan	jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	2 4 6 8 10
		3. Pengumpulan Hasil hutan	Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	0 2 4 6 8 10
	f.	Sektor pertambangan dan bahan galian C	Jika tidak ada	0
		1. Penambangan galian C kerakyatana/perora gan	Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	2 4 6 8 10
		2. Pemilik usaha pertambangan skala kecil dan besar	Jika tidak ada Kurang dari 1% dari jumlah total penuduk 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15%	10 0 2 4 6 8 10
		3. Buruh usaha pertambangan	Jika tidak ada Kurang dari 5% dari jumlah total penuduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	0 2 4 6 8 10

No	Indikator	Penilaian	Skor
	g. Sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga 1. Sebaran mata pencaharian penduduk di sektor/usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga 2. Penyerapan tenaga kerja	Bila tidak ada penduduk yang bermata pencaharian tetap di sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga Bila jumlah jenis usaha yang ada di sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga mencapai Kurang dari 2 jenis 3-5 jenis 5-10 jenis 10-15 jenis Lebih dari 15 jenis Bila dari semua jenis usaha sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga mmpu menyerap tenaga kerja Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk 5-15% 15-30% 30-50%	0 2 5 7 9 10 2 4 6 8
	h. Sektor industri menengah dn besar 1. Karyawan perusahaan swasta	Bila tidak ada penduduk yang bermatapencaharian tetap sebagai karyawan perusahaan swasta Bila jumlah karyawan swasta mencapai Kurang dari 5% jumlah total penduduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	0 2 4 6 8 10

No	Indikator	Penilaian	Skor
	2. Karyawan perusahaan pemerintah	Bila tidak ada penduduk yang bermatapencaharian tetap sebagai karyawan perusahaan pemerintah Bila jumlah karyawan pemerintah mencapai Kurang dari 5% jumlah total penduduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	0 2 4 6 8 10
	3. Pemilik perusahaan industri menengah dan besar	Jika tidak ada penduduk yang menjadi pemilik perusahaan yang beroperasi di desa/kelurahan Jika ada jumlahnya kurang dari 1% dari jumlah total penduduk 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15%	0 2 4 6 8 10
	i. Sektor perdagangan 1. Pengusaha perdagangan hasil bumi	Jika tidak ada penduduk yang menjadi pengusaha perdagangan hasil bumi. Jika ada jumlahnya kurang dari 1% dari jumlah total penduduk 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15%	0 2 4 6 8 10

No	Indikator	Penilaian	Skor
	2. Buruh jasa perdaganagn hasil bumi	Bila tidak ada penduduk yang bermat pencaharian tetap sebagai buruh karyawan perusahaan jasa perdagangan hasil bumi. Bila ada jumlahnya kurang dari 5% dari jumlah total penduduk 5-15% 15-30% 30-50%	0 2 4 6 8 10
	j. Sektor jasa 1. Jenis usaha jasa yang ada	Bila ada penduduk yang tidak bermatapencaharian tetap di sektor jasa yang ada Bila ada, jenis usaha sektor jasa yang menjadi mata pencaharian utama penduduk berjumlah kurang dari 3 jenis usaha jasa 3-5 jenis 6-10 jenis 11-15 jenis Lebih dari 15 jenis usaha	0 2 4 6 8 10
	2. Penyerapan tenaga kerja di sektor jasa	Bila dari semua jenis usaha sektor jasa yang ada, jumlah penduduk yang bermata pencaharian tetap di sektor jasa yang ada mencapai. kurang dari 5% dari jumlah total penduduk 5-15% 15-30% 30-50% Lebih dari 50%	2 4 6 8 10

Sumber: Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan, lampiran IV

6. Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat

Tabel: II.6 Indikator Penilaian Potensi Penguasaan Aset Ekonomi

Masvarakat

No	Indikator	Penilaian	Skor
6	Penguasaan aset ekonomi masyarakat		
	a. Aset tanah	Jika jumlah penduduk yang memiliki tanah kurang dari	
		10% dari jumlah total	
		penduduk 10-25%	2 4
		25-50%	6
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	10
	b. Aset sarana		
	transportasi umum		
	Memiliki ojek	Jika tidak ada penduduk yang	1
	sepeda motor	memiliki ojek sepeda motor Jika jumlah pemilik kurang	1
		dari 5% dari total jumlah	
		penduduk	2
		5-10%	3
		10-25%	4
		25-50%	5
		Lebih dari 50%	6
	Memiliki becak	Jika tidak ada penduduk yang	
	atau bentor, cidemo,	memiliki	1
	andong dan dokar	Jika jumlah pemilik kurang	
		dari 5% dari total jumlah	2
		penduduk	3
		5-10%	4
		10-25% 25-50%	5 6
		Lebih dari 50%	0
	Memiliki angkutan	Jika tidak ada penduduk yang	
	desa, minibus	memiliki	1
		Jika jumlah pemilik kurang	
		dari 5% dari total jumlah	
		penduduk.	3
		5-10%	4
		10-25% 25-50%	5 6
		Lebih dari 50%	7

No	Indikator	Penilaian	Skor
	c. Aset sarana produksi 1. Jenis sarana produksi	Jika tidak ada salah satu pun jenis sarana produksi di desa Jika ada kurang dari 2 jenis 3-4 jenis 5-6 jenis 7-8 jenis 9-10 jenis 11-20 jenis Lebih dari 20 jenis	0 4 5 6 7 8 9
	2. Kepemilikan sarana produksi	Jika tidak ada penduduk yang memiliki sarana produksi yang ada di desa/kelurahan ini. jika jumlah penduduk yang memiliki sarana produksi kurang dari 5% dari jumlah total penduduk. 5-10% 10-15% 15-25% 25-50% Lebih dari 50%	0 1 2 3 5 7 10

Sumber: Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan, lampiran IV

7. Aset Perumahan

Tabel: II.7 Indikator Penilaian Untuk Aset Perumahan

	II.7 Indikator Penilaian Untuk Aset Perumahan			
No	Indikator	Penilaian	Skor	
7	Aset perumahan a. Rumah menurut dinding			
	1. Tembok	Jika tidak ada rumah penduduk yang dindingnya tembok Jika jumlah rumah dinding tembok kurang dari 5% dari total	2	
		jumlah rumah yang ada 5-10%	3 4	
		10-15%	5	
		15-25%	6	
		25-50%	7	
		50-75%	8	
		Lebih dari 75%	9	
	2. Kayu	Jika tidak ada rumah penduduk yang dindingnya kayu Jika jumlah rumah dinding kayu kurang dari 5% dari total jumlah	9	
		rumah yang ada 5-10%	8 7	
		10-15% 15-25%	5	
		25-50%	4	
		50-75%	3	
		Lebih dari 75%	2	
	3. Bambu	Jika tidak ada rumah penduduk yang berdinding bambu Jika jumlah rumah dinding bambu kurang dari 5% dari total	9	
		jumlah rumah yang ada 5-10% 10-15% 15-25% 25-50% 50-75% Lebih dari 75%	8 7 5 4 3 2	

No		Indikator	Penilaian	Skor
	4.	Tanah liat	Jika tidak ada rumah penduduk yang berdinding tanah liat Jika jumlah rumah dinding tanah liat kurang dari 5% dari total	10
			jumlah rumah yang ada 5-10%	4
			15-25%	3
			Lebih dari 25%	2
	5.	Pelepah kelapa/lontar	Jika tidak ada rumah penduduk yang berdinding pelepah dan	1
		dan dedaunan	dedaunan	10
			Jika jumlah rumah dinding	
			pelepah dan dedaunan kurang	
			dari 5% dari total jumlah rumah	6
			yang ada 5-10%	6 5
			10-15%	4
			15-25%	3
			25-50%	2
			50-75%	1
	b.	Rumah menurut	Lebih dari 75%	0
		lantai	Jika tidak ada rumah penduduk	
		1. Keramik	yang berlantai keramik Jika jumlah rumah lantai	2
			keramik kurang dari 5% dari	
			total jumlah rumah yang ada	3
			5-10%	4
			10-15%	5
			15-25%	6
			25-50%	7
			50-75% Lebih dari 75%	8
		2. Semen	Jika tidak ada rumah penduduk	9
		z. Semen	yang berlantai semen	2
			Jika jumlah rumah lantai semen	
			kurang dari 5% dari total jumlah	
			rumah yang ada	3
			5-10%	4
			10-15%	5
			15-25% 25-50%	6 7
			50-75%	8
			Lebih dari 75%	9

No	Indikator	Penilaian	Skor
	3. Kayu	Jika tidak ada rumah penduduk yang berlantai kayu Jika jumlah rumah lantai kayu kurang dari 5% dari total jumlah	2
		rumah yang ada	3
		5-10%	4
		10-15%	5
		15-25%	6
		25-50%	7
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	9
	4. Tanah	Jika tidak ada rumah penduduk	9
	4. Tanan	yang berlantai tanah	2
		Jika jumlah rumah lantai tanah kurang dari 5% dari total jumlah	
		rumah yang ada	3
		5-10%	4
		10-15%	5
		15-25%	6
		25-50%	7
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	9
	c. Rumah menurut	Jika tidak ada rumah penduduk	
	atap	yang beratap genteng	2
	1. Genteng	Jika jumlah rumah beratap	
		genteng kurang dari 5% dari	2
		total jumlah rumah yang ada	3
		5-10%	4
		10-15%	5
		15-25%	6
		25-50%	7
		50-75%	8
	2 9	Lebih dari 75%	9
	2. Seng	Jika tidak ada rumah penduduk	_
		yang beratap seng	2
		Jika jumlah rumah beratap seng	
		kurang dari 5% dari total jumlah	2
		rumah yang ada	3
		5-10%	4
		10-15%	5
		15-25% 25-50%	6
		25-50% 50.75%	7
		50-75% Lebih dari 75%	8
		Leoni dan 1370	7

No	Indikator	Penilaian	Skor
	3. Asbes	Jika tidak ada rumah penduduk	
		yang beratap asbes	8
		Jika jumlah rumah beratap asbes	
		kurang dari 5% dari total jumlah	
		rumah yang ada	7
		5-10%	
		10-15%	5
		15-25%	4
		25-50%	3
		50-75%	2
		Lebih dari 75%	1
	4. Beton	Jika tidak ada rumah penduduk	
		yang beratap beton	2
		Jika jumlah rumah beratap beton	
		kurang dari 5% dari total jumlah	
		rumah yang ada	3
		5-10%	4
		10-15%	5
		15-25%	6
		25-50%	7
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	9
	5. Kayu dan	Jika tidak ada rumah penduduk	
	bambu	yang beratap kayu dan bambu	1
		Jika jumlah rumah beratap	
		bambu kurang dari 5% dari total	
		jumlah rumah yang ada	2
		5-10%	3
		10-15%	4
		15-25%	5
		25-50%	6
		50-75%	7
		Lebih dari 75%	8
	6. Daun lontar,	Jika tidak ada rumah penduduk	
	gerbang,	yang beratap dedaunan	9
	ilalang dan	Jika jumlah rumah beratap	
	dedaunan	dedaunan kurang dari 5% dari	
	lainnya	total jumlah rumah yang ada	8
		5-10%	7
		10-15%	6
		15-25%	5
		25-50%	3
		50-75%	2
		Lebih dari 75%	1

Lebih dari 75% 1
Sumber: Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan l.IV

8. Penguasaan Aset Ekonomi Lainnya

Tabel: II.8 Penilaian Terhadap Penguasaan Aset Ekonomi Lainnya

No	Indikator	Penilaian	Skor
8	Pemilikan aset ekonomi		
	lainnya		
	Sebaran jumlah	Bila tidak ada satu jenis pun aset	
	aset ekonomi	ekonomi yang dimiliki	
	lainnya	penduduk desa	0
		Bila jumlah jenis aset yang	
		dimiliki penduduk kurang dari 2	
		jenis	1
		3-5 jenis	2
		6-8 jenis	3
		9-10 jenis	4
		11-15 jenis	5
		16-20 jenis	6
		21-30 jenis	7
		Lebih dari 30 jenis	8

Sumber: Panduan Teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan, lampiran IV

3. Rekapitulasi Skoring Data Kondisi Nagari

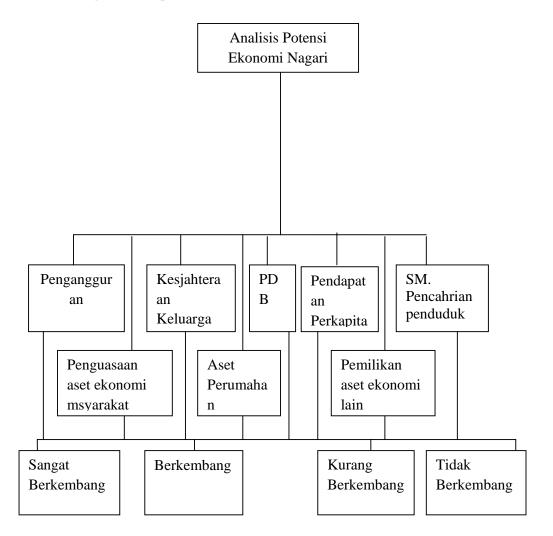
Dalam menentukan kategori potensi suatu nagari, maka digunakan penjumlahan Skor tiap indikator yang diteliti. Adapun penjabaran dari potensi ekonomi masyarakatdi suatu nagari dari yang terendah dan tertinggi yang diteliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: II.9 Rekapitulasi Skoring Potensi Ekonomi Nagari

No	Kondisi Ekonomi Masyarakat	Terendah	Tertinggi
1	Pengangguran	1	10
2	Kesejahteraan Keluarga	1	10
3	Pendapatan Domestik Nagari	24	60
4	Pendapatan Perkapita	5	40
5	Struktur Mata Pencaharian Penduduk	0	100
6	Penguasaan Aset Ekonomi	11	65
7	Aset Perumahan	24	135
8	Penguasaan Aset Lainnya	0	17
Jumlah		66	437

 ${\bf Sumber: Panduan\ Teknis\ pengolahan\ data\ profil\ desa\ dan\ kelurahan\ lampiran\ IV}$

B. Kerangka Konseptual



Keterangan:

- Sangat berkembang, jika perolehan skor total pengukuran mencapai lebih dari 90% dari jumlah total skor maksimal potensi nagari yaitu 437.
- Berkembang, jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal potensi nagari yaitu 437.

- 3. Kurang berkembang, jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal potensi nagari yaitu 437.
- 4. Tidak berkembang, jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal potensi nagari yaitu 437.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan delapan indikator untuk menentukan potensi nagari dari aspek ekonomi masyarakat di nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab bagian utara untuk dapat diambil kesimpulan sebagai berikut .

- Setelah dilakukan penilaian terhadap delapan indikator maka diperoleh hasil bahwa potensi ekonomi nagari yang ada di kecamatan Sungai Tarab bagian utara termasuk ke dalam nagari yang sudah berkembang.
- 2. Penilaian terhadap pengangguran yang meliputi usia angkatan kerja yang masih sekolah/ melanjutkan studi, kemudian yang bekerja tidak tentu serta tidak bekerja sama sekali tergolong tidak terlalu tinggi. Hal ini karena rata-rata usia angkatan kerja (18-56 tahun) bekerja secara continue atau tetap.
- 3. Kesejahteraan keluarga tergolong sedang, hal ini dilihat dari jumlah rumah tangga yang tergolong ke dalam kategori prasejahtera dan sejahtera I lebih rendah dari rumah tangga yang sudah terkategori ke dalam sejahtera II dan III.
- 4. Pendapatan domestik nagari dominan disumbangkan oleh alam, baik dari sektor pertanian, ladang/ perkebunan.

- Pendapatan perkapita di kecamatan sungai tarab bagian utara tergolong rendah. Karena penghasilan masyarakat hanya berkisar di di bawah 4 juta /tahun.
- 6. Struktur mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sungai Tarab bagian utara didominasi oleh pertanian. Hal ini karena adanya dukungan dari kondisi geografisnya. Selain pertanian, usaha industri rumah tangga juga menjadi sorotan untuk bisa dikembangkan. Serta potensi perkebunan yang memungkinkan untuk membudidayakan casiavera.
- 7. Penguasaan aset ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab tergolong tinggi hal ini karena rata-rata msyarakatnya memiliki tanah sebagai aset ekonomi. Lalu, untuk kepemilikan sarana transportasi umum tergolong rendah karena dari total penduduk, kepemilikan ojek dibawah 100, dan minibus hanya dibawah 10.
- 8. Penilaian terhadap aset perumahan di Kecamatan Sungai Tarab bagian utara tergolong ke dalam kategori baik karena hampir semua masyarakat memiliki rumah sendiri. Namun masyarakat masih banyak yang tinggal dirumah yang berdinding kayu, beratap seng. Dan hanya sebagian kecil yang masih beratap bambu.
- Untuk penguasaan aset ekonomi lainnya kecamatan sungai tarab bagian utara, masing-masing nagari ada masyarakat yang memiliki aset ekonomi

B. SARAN

- Pengangguran yang ada sebaiknya segera dicarikan solusi oleh pemerintahan daerah, agar jumlah angkatan kerja yang seharusnya bekerja mendapatkan pekerjaan.
- 2. Nagari Koto Baru perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintahan kecamatan Sungai Tarab.
- 3. Nagari Koto Tuo bisa dijadikan salah satu contoh yang bisa dipanuti oleh nagari lain dalam hal rendahnya pengangguran di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afria, Vivi.2010. Kajian Pemanfaatan Potensi Sarana dan Prasarana di KeNagarian Durian Gadang. Padang. Skripsi
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta
- Badan pusat statistik. 2010. Kecamatan sungai tarab dalam angka. Padang
- Bakaruddin. 2001. Geografi pedesaan dan perkotaan. (Hand Out). FIS UNP: Padang
- Bone, Marnis dan Khairani . *Panduan Penyusunan proposal penelitian dengan mudah*. (Padang: Yajhika, 2009)
- Depdagri. 2007. Panduan Teknis Pengolahan data Profil desa dan Kelurahan
- Depdiknas.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
 Utama
- Dwiyanto, Arif.2007. Peranan penambangan minyak tradisional dalam pembangunan masysrakat desa. Semarang. Tesis
- Fattah, sanusi. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta. Pusat perbukuan departemen pendidikan nasional.
- http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pegangguran-friksional-struktural-musiman-siklikak di akses 1 Juli 2011
- http://pekoprabowo.blogspot.com/2011/03/pengangguran.html di akses 1 Juli 2011
- http://id.wikipedia.org/wiki/Desa di akses 11 Maret 2011
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran di akses 1 Juli 2011